

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Subagyo Agus, *Terorisme Aktor dan Isu Global Abad XXI*, Bandung : Alfabet. 2015, hlm. V.
- Fuady Munir, *Teory Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009,Cet.1.
- M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.
- Jahroni Jajang & Makruf, Jamhari *Memahami Terorisme Sejarah Konsep dan Model*, Jakarta:PT Balebat Dedikasi Prima, 2016, hlm. 3.
- Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali pers. 2009, hlm.2.
- Kenedi Jhon, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Bengkulu : Pustaka Pajar IAIN Bengkulu Press, hlm.vi.
- R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Ngunut : Sinar Grafika, 2014, hlm. 35.
- M. Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grapika, 2000, hlm. 157.
- Viana Oly Agustina, *Perkembangan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Depok :Raja Grapindo Persada, 2021, hlm.151.
- Marbun, Rocky *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2019, hlm. 35.
- Efendi Tolib, *Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya : Penerbit Putaka Yustisia, 2013, hlm.3.

Sudarsono Teguh, *Wacana Pemahaman Tentang Reformasi Polri*, Denpasar: Percetakan Ratna Sari, 2004, hlm. 3.

Muradi, *Densus 88 AT Konflik, Teror dan Politik*, Bandung : Dian Cipta, Cetakan 1, Agustus 2012, hlm.1.

Jurnal:

Benny Agustia Putera, “Sejarah Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, Vol.2.(2) 107-118, 2017.

Rizky Saputra, *et al.*, “Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No.9, September 2023.

Aloysius Harry Mukti & Yohanes Febrian, Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme Dalam Era Digital Keuangan (Fintech), *Article in Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, November 2018.

MKRI, "Mahfud MD Jelaskan Gagasan Membangun Hukum di ISNU", <http://mkri.id/index.php>. diakses umat 09 November 2012 pukul 16.34 WIB.

Humas Polri, Densus 88 Bekerja Demi Bangsa dan Negara, Jakarta:Media Informasi Polri No. 4 TRIBRATA News 2016, hlm. 1

Sekretariat TU DKPP, “Prof. Teguh Paparkan Teori Keadilan Bermartabat Dalam Sekolah Kepemiluan Gamki”, <https://dkpp.go.id/prof-teguh-paparkan-teori-keadilan-bermartabat-dalam-sekolah-kepemiluan-gamki/> diakses pada 18 Desember 2023.

Ardli Johan Kusuma, *et al.*, Analisis Perkembangan Norma Internasional”War On Terror’ Dalam Perspektif Realis, Liberalis dan Konstruktif, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesian Perspective Vol.4 No.1, Januari-Juni 2019*.

Fakhri Usmita, “Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 17 No. 1: 49-63.

Taufik Siregar, “Kajian Yuridis Terhadap Kelemahan KUHP dan

- Penyempurnaannya”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*.9.2017.
- Ahmad Jazuli, “Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.Volume 10 Nomor 2, Juli 2016.
- Zaenal Muhtar, “Eksistensi Densus 88”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 1, Juni 2014.
- Sigit Herman Birnaji, *et al.*, “Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Terorisme di Yogyakarta”, *Jurnal Qisti Unwahas*, hlm. 252-272, November 2023.
- Juprizal Nasution, *Peranan Densus 88 Menanagani Aksi Terorisme di Indonesia Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia*, Naskah Publikasi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2020.
- Remarcho Meinaky & Fakhlur, ”Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Menangani Aksi Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Republika*.
- Lundu Harapan Situmorang, ”Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Hukum”, *Jurnal Universitas Atmajaya Jogjakarta*, 2016
- Andrian Uumbu Sunga. “Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian”, *Jurnal Hukum UAJY*, 2016
- A.M Lubis, “Peranan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Terorisme di dalam Penanganan Pelaku Terduga Teroris”, *Jurnal Univ Amir Hamzah*, Volume 17 Nomor 1
- Damos Christian Aritonang, *et al.*, “Penyelidikan Dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audia Visul Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan”, *Res Nulleus Jurnal*, Vol. 4 No. 1, Januari 2022
- Litbang Polri, “Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri”, *Jurnal*

Litbang Polri, Vol. 22 No.1, 2019.

Ghaos Masoga, “Kedudukan Peraturan Kepolisian Dalam Struktur Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*, Unram, 2002

Koman Panji Jayawisasta, “Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 9 No. 9, Tahun 2020’

Andrian Umbu Sunga, “Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian”, *ejournal*, Unsrat, 2016.

Daffa Dhiya, “Penangkapan Dalam Hukum Acara Pidana”, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/penangkapan-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada 30 Desember 2023

Marthisan Y Anakkota, “Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral”, *Jurnal Belo*, Vol V No. 1, Agustus 2019-Januari 2020

Anto Mutriyadi Lubis, *et al.*, “Peranan Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Terorisme Didalam Penanganan Pelaku Terduga Terorisme”, *Jurnal hukum Universitas Dharmawangsa*, Volume 17, Januari 2023.

Magister Ilmu Hukum Medan Area, “Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap”, *Jurnal*, Vol. 2 No. 28, Desember 2021.

Usman Hadi, *Kuasa Hukum Keluarga Siyono Yang Mati DiTangan Densus Ajukan Praperadilan*, .Detiknews Kamis 28 Feb 2019 pukul 12.38 WIB.

Antara Jaten, *.Kepolisian Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Keluarga Terduga Teroris Siyono*, Senin 18 Maret 2019 pukul 12.52 WIB.

Tomi, *Permohonan Praperadilan Kematian Siyono Ditolak*, Krjogja, Selasa 26 Maret 2019 pukul 15.44 WIB

Edi Suwiknyo, *Suami Tewas Dianiyaya, Istri Siyono Gugat Densus 88 ke PN Jaksel*, *Bisnis.com*, Minggu 10 April 2022 pukul 13.04 WIB

Yanus Rajalahu, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Propesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia, ex crimen*, Vol.II/No.2, April –Juni 2013

Bitu Gadsia Spaltani, “Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Terorisme Dengan Pendekatan Hukum Transendental”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 3, Desember 2019

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Perkap Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme